



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 23%

Date: Sunday, November 24, 2019

Statistics: 508 words Plagiarized / 2234 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PUBLIK BAGI APARATUR DESA DI DESA
TEGALARUM KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH
Moeljono1*, Williyanto Kartiko Kusumo2 12 Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang,
sastro@usm.ac.id1

ABSTRAK __ Abstrak: Tujuan dari pengabdian masyarakat adalah memberikan pelatihan penerapan pengambilan kebijakan publik dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

Diharapkan melalui kegiatan tersebut akan mendorong kecakapan aparatur desa dalam pengambil keputusan publik dengan mengedepankan skala prioritas keputusan yang diambil. Metode kegiatan digunakan Participatory Learning and Action. Kegiatan dilakukan dengan menekankan pada kegiatan ceramah, diskusi, curah pendapat yang dilakukan secara interaktif dengan anggota kelompok dan dilanjutkan dengan aksi atau kegiatan riil yang relevan dengan materi pelatihan.

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, peserta memiliki respon dan antusias terhadap pelatihan dan tercipta perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Kata Kunci: Desa Tegalarum, Participatory Learning and Action, Kebijakan public pelatihan aparatur desa.

Abstract: The purpose of this public service activities is to provide training implementation of public policy making in improving the capacity of government personnel village. It is expected that these activities will encourage proficiency in the village officials to prioritize public decision making decisions priorities. The method used is activity Participatory Learning and Action.

This activity is carried out with an emphasis on activities of lectures, discussions, brainstorming performed interactively with members of the group and continued with the action or real activities relevant to the training materials. The results of community service activities run in accordance with a predetermined plan, the public has an enthusiastic response and to training and create changes in knowledge, attitudes and skills in making public policy. Keywords: Tegalarum village, Participatory Learning and Action, public policy, training of village officials.

___ Riwayat Artikel: Diterima: ...-...-2019, Disetujui: ...-Desember-2019 _ / _ / _
_ <https://doi.org/10.31764/jces.v3i1.XXX> _ This is an open access article under the
CC-BY-SA license _ _ _ _

PENDAHULUAN Desa Tegalarum, terletak di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, terdiri dari 3 (tiga) perdukahan yakni, Ngumpul, Blado dan Ngaluran, dan jumlah RW 4 yang terbagi menjadi 20 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 5.228 jiwa, (Data Desa Tegalarum, 2019).

Desa ini sangat strategis dalam sistem dan skema kebijakan publik terutama dalam tahap implementasi, baik kebijakan publik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, mengingat posisi desa yang berbatasan dengan kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai jalur alternatif pantura, sehingga tercipta dinamika perubahan sosial dalam aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik yang cukup tinggi.

Dinamika tersebut, sangat cepat berpengaruh di tingkat lokal, nasional maupun global dan memerlukan respon yang cepat, sekaligus menyiapkan antisipasi terhadap munculnya dampak yang mungkin muncul. Lompatan teknologi yang begitu cepat, akan membawa tantangan baru bagi pengambil keputusan. Merujuk pada tantangan yang dihadapi oleh para pengambil keputusan, maka dibutuhkan respon strategis yang menjamin tercapainya produk kebijakan yang berkualitas yang mampu memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat. Kualitas kebijakan pada akhirnya menjadi keharusan, karena perubahan akan berdampak bagi masyarakat.

Kualitas kebijakan yang rendah dapat dikenali melalui beberapa aspek, misalnya rendahnya tingkat kepatuhan yang mengakibatkan biaya sosial kebijakan yang tinggi, prosedur yang berlebihan atau tumpang tindih dengan kebijakan lain, dan ketidakjelasan urgensi keberadaan suatu kebijakan publik. Kesalahan dalam pengambilan keputusan yang berupa kebijakan berdampak luas pada masyarakat.

Kebijakan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya. Demikian pula dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Pemerintahan disemua tingkatan pasti berhadapan dengan kelangkaan sumberdaya yang terbatas, dan berbagai masalah publik yang makin kompleks, maka pemerintah dituntut untuk menyelesaikan persoalan tersebut, agar tidak menimbulkan implikasi yang tidak diinginkan, tidak kecuali pada level pemerintahan desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Oleh karena pemerintah desa dihadapkan pada situasi keterbatasan sumber daya di satu sisi dan masalah-masalah publik yang makin kompleks di sisi lain, pemerintah desa tidak mungkin menyelesaikan semua masalah tersebut secara bersamaan. Aparatur Pemerintahan, harus menentukan pilihan menyelesaikan permasalahan publik tersebut

berdasarkan skala prioritas.

Kebijakan publik secara sederhana merupakan bentuk pernyataan formal dari pemerintah tentang pilihan terbaik dari berbagai alternatif penyelesaian masalah publik. Timbulnya kebijakan publik dilandasi adanya kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para stakeholders, terutama pemerintah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, (Ramdhani dan Ramdhani, 2017;1). Maka, pemerintahan yang dikelola oleh para aparatur dituntut memiliki kemampuan yang memadai agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan lingkungan.

Dalam hal ini peran kebijakan publik dan perumus kebijakan publik menjadi sangat vital. Dunn (2004) menyebutkan 3 elemen kebijakan: pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan dan kebijakan publik. Kebijakan publik lahir karena tuntutan yang merupakan serangkaian pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem.

Dalam waktu yang bersamaan ada keterbatasan dari lingkungan yang akan mempengaruhi pembuat kebijakan. Faktor lingkungan tersebut antara lain: sosial ekonomi, sumberdaya alam, iklim, topografi, demografi, budaya dan sebagainya. Tugas dan tanggung jawab pemerintahan desa dalam melakukan pengambilan kebijakan publik menurut Dunn (2004) adalah: 1.

Penetapan agenda kebijakan (agenda setting), 2. Formulasi kebijakan. 3. Adopsi kebijakan, 4. Implementasi kebijakan dan proses pemantauan tahapan, dan 5. Evaluasi kebijakan. Unsur tersebut belum sepenuhnya dilakukan oleh aparatur pemerintah desa Tegalarum, sehingga belum terpenuhinya keinginan dan kepuasan masyarakat, karena masyarakat belum diberikan ruang untuk menyuarakan aspirasinya disebabkan adanya kepercayaan yang besar terhadap kepala desa dan aparatur desa.

Permasalahan ini merupakan masalah klasik yang ada didesa, yakni terkait dengan aspek pengambilan keputusan kebijakan yang bersifat sentralistik dimana masih besarnya pengaruh kepala desa dan aparat desa dalam pengambilan keputusan. Melihat permasalahan tersebut, untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam mewujudkan pengambilan kebijakan yang mampu berfungsi sebagai penopang kesejahteraan masyarakat, maka solusi yang ditawarkan adalah mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pelatihan Penerapan Kebijakan Publik bagi Aparatur Desa di Desa Tegalarum, yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat bekerjasama dengan aparatur desa Tegalarum.

Kegiatan pengabdian bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa tentang pengambilan dan implementasi kebijakan Publik. Dengan harapan akan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan dan kemampuan yang lebih tinggi, sehingga pelatihan lebih bersifat penerapan segera untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian, jadi lebih bersifat praktis.

Manullang (1997:83) MASALAH Permasalahan yang adalah para aparatur pemerintahan desa Tegalarum bimbang dalam menentukan skala prioritas permasalahan dan menetapkan keputusan yang diambil. Hal ini dikarenakan permasalahan di tingkat masyarakat sangat kompleks dan perlu penanganan segera. METODE PELAKSANAAN Metode yang digunakan adalah Participatory Learning and Action (PLA) merupakan bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya lebih dikenal dengan "Learning by Doing? atau belajar sambil bekerja (Phuyal, 2008; IIED, 2013 dalam Mardikanto, 2013), Participatory Learning Action merupakan proses belajar secara berkelompok yang dilakukan secara interaktif dalam suatu proses kerja (Appel dkk, 2012).

Konsep kegiatan PLA dilakukan dengan menekankan pada kegiatan ceramah, diskusi, curah pendapat yang dilakukan secara interaktif dengan anggota kelompok dan dilanjutkan dengan aksi atau kegiatan riil yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat (Theresia, 2014). Kegiatan ini diikuti oleh aparatur pemerintahan Desa Tegalarum, berjumlah 7 (tujuh) orang.

Pelaksanaan kegiatan melalui tiga tahap yaitu tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Secara umum tahapan kegiatan pengabdian ini dapat dilihat pada gambar 2. Gambar 2. Bagan Tahapan Kegiatan Berikut penjelasannya pada tahap kegiatan. Tahap awal. Kegiatan pada tahap ini meliputi Survey, Merupakan kegiatan awal untuk menganalisis dan mencari informasi secara menyeluruh mengenai permasalahan agar dapat ditemukan solusi yang tepat sasaran.

Kelengkapan administrasi dilakukan sebagai prosedur formal untuk melegalkan kegiatan pengabdian Merancang dan menyusun kegiatan pelatihan yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan. Tahap inti. Proses kegiatan pada tahap ini adalah fokus pada kegiatan pengabdian yang dilakukan yaitu pendampingan dan bimbingan melalui serangkaian pelatihan.

Agenda kegiatan pelatihan yang dilakukan adalah penerapan kebijakan publik. Target sasaran peserta pelatihan adalah aparatur pemerintahan desa dan masyarakat. Selanjutnya dilakukan evaluasi dengan melihat indikator tahapan perubahan perilaku berdasarkan skala 0-25 kategori rendah, skala 26-50 kurang, skala 51-75 cukup dan

skala 76-100 tinggi. Tahap akhir.

Ada dua kegiatan dalam tahap ini yaitu: Evaluasi kegiatan yang akan dilakukan kegiatan dan secara menyeluruh; Penyusunan Laporan Pengabdian HASIL DAN PEMBAHASAN Tahap Awal Kegiatan pendampingan dilakukan selama 1 hari, namun didahului dengan analisis situasi sosial yakni survey. Tahap Survey dan Analisis Situasi Sosial, dilakukan dengan melibatkan beberapa warga desa dengan tujuan untuk melakukan identifikasi potensi dan permasalahan yaitu aspek kelembagaan desa, aspek manajemen pelayanan aparatur desa, aspek kebijakan desa, aspek pembangunan desa, aspek kesehatan, aspek infrastruktur dan aspek kebijakan pemerintahan desa. Kegiatan difokuskan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa kepala keluarga.

Hasil survey selanjutnya diolah dengan membuat matrik hasil survey dan wawancara. Hasil pengamatan dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Hasil Survey dan Analisis Situasi Sosial _ _No _Aspek _Hasil Survey dan Wawancara _ _1 _Kelembagaan Desa _Pola Hierarki. _ _2 _Pelayanan Desa _Belum memberikan kepuasan terhadap masyarakat dari sisi kemudahan dan kecepatan pelayanan.

_ _3 _Kebijakan Desa _Kurang cepat dalam merespon isu-isu yang berkembang dan belum ada skala prioritas keputusan yang akan diambil. _ _4 _Pembangunan Desa _Didominasi pembangunan infrastruktur. _ _5 _Kesehatan _Kesadaran hidup sehat bagus walaupun terdapat keterbatasan _ _6 _Infrastruktur _Sudah maksimal dan sampai saat ini menjadi prioritas utama _ _7 _Kebijakan _Pengambilan keputusan masih bersifat sentralistik dan kebijakan dilakukan secara top down _ _ Tahap Inti (Kegiatan Pelatihan Pengambilan Kebijakan Publik) Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah Sosialisasi program Sosialisasi diberikan terkait program yang akan dilaksanakan.

Kegiatan dilaksanakan di Kantor desa dengan dihadiri seluruh aparatur desa. Pada tahap ini, tim pengabdian masyarakat melakukan sosialisasi program pelatihan penerapan kebijakan publik yang dilaksanakan di Desa Tegalarum selama satu hari. Kegiatan sosialisasi program yang diadakan pada tanggal 26 Maret 2019 ini dihadiri oleh kepala desa, ketua BPD dan aparatur desa bertempat di Pendopo Desa Tegalarum.

Pada saat sosialisasi respon yang diberikan sangatlah antusias dan mendorong agar kegiatan pelatihan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Selanjutnya kepala desa dalam sambutannya mengharapkan agar kegiatan pengabdian ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur pemerintahan desa serta menjadi motivasi dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tertera pada Tabel 2. Tabel 2.

Jadwal Pelatihan Implementasi Kebijakan Publik __No _Kegiatan _Waktu _Ket. __1
_Sosialisasi program _26 Maret 2019 _Tim __2 _Kegiatan Pelatihan Kebijakan Publik _26
Maret 2019 _Moeljono. Williyanto K Kusumo. __4 _Penyusunan Laporan Kegiatan _30
Maret 2019 _Tim __ Kegiatan Pelatihan Pengambilan Kebijakan Publik Kegiatan, diikuti
oleh aparatur pemerintahan desa.

Materi-materi yang diberikan adalah Mapping Permasalahan, Analisa SWOT dan
Pengukuran Skala Prioritas. Kegiatan dilaksanakan tanggal 26 Maret 2019, diikuti oleh
seluruh aparatur pemerintahan desa, berjumlah 7 orang. Tahap Akhir Untuk mengetahui
tingkat keberhasilan pencapaian kegiatan dilakukan evaluasi. Prosedur evaluasi dikaitkan
dengan kriteria keberhasilan.

Evaluasi pelatihan merupakan bagian yang penting dalam kurikulum, yakni sebagai
usaha pengumpulan informasi untuk membuat pertimbangan dan keputusan, baik
secara keseluruhan maupun secara parsial, Hamalik (2000:54). Untuk itu perlu disusun
seperangkat instrument pengukuran tertentu. Pada kegiatan pelatihan ini sebagai aspek
instrument adalah reaksi, pelajaran, tingkah laku dan hasil, berikut hasil evaluasi
program pelatihan aparatur pemerintah desa Tegalarum seperti pada Tabel 3. Tabel 3.

Evaluasi dan Penilaian Pelatihan Penerapan Kebijakan Publik __No _Aspek _Keterangan
_Nilai/Skor __1 _Reaksi _Peserta menyambut baik kegiatan pelatihan dan mengikutinya
dengan sangat antusias _75 __2 _Pelajaran _Mempelajari fakta, prinsip-prinsip dan
pendekatan yang tercakup dalam latihan. _70 __3 _Tingkah laku _Pola pekerjaan
berubah karena mengikuti pelatihan dan dapat merubah etos dan budaya kerja dalam
organisasi.

_70 __4 _Hasil _Peserta dapat mengukur biaya dalam implementasi kebijakan publik,
perbaikan kinerja dalam pelayanan publik dan mampu membuat struktur birokrasi yang
handal dalam melayani masyarakat _70 __Nilai/Skor _71,25 __ Pada tabel 3
digambarkan bahwa rata-rata perubahan perilaku aparatur sebesar 71,25 atau berada
pada kategori cukup, hal ini disebabkan kesadaran dan kemauan untuk mengikuti
kegiatan pelatihan sangat besar, dengan demikian dapat diindikasikan bahwa tingkat
perubahan perilaku setelah mengikuti kegiatan pelatihan cukup baik, sedangkan sisanya
sebesar 28,75 perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut.

Hasil evaluasi diperlukan sebagai informasi masukan bagi pengelola program dan
pengembangan program pelatihan selanjutnya, yang mendukung program pelatihan
berkelanjutan. Hal ini dikarekakan bahwa kebijakan publik merupakan bagian, atau
interaksi dari politik, ekonomi, sosial dan kultural. Salah satu implikasinya, kebijakan
publik pun senantiasa berinteraksi dengan dinamika dari kondisi politik, ekonomi, sosial,

dan kultural di mana kebijakan itu diimplementasikan (Nugroho, 2014).

SIMPULAN DAN SARAN Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu tingkat keberhasilan pencapaian dengan menggunakan indikator perubahan perilaku untuk kegiatan pelatihan penerapan pengambilan kebijakan publik sebesar 71,25 yaitu berada pada kategori cukup. Aparatur Pemerintahan Desa Tegalarum sebagai mitra pengabdian masyarakat memiliki respon dan antusias yang sangat besar terutama dalam proses pelatihan walaupun dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Kegiatan pengabdian seharusnya dilakukan secara kebersinambungan agar kapasitas dan kemampuan aparatur desa terus meningkat seiring meningkatkannya perubahan dinamika masyarakat. Pengabdian selanjutnya diarahkan tidak hanya pada aparatur desa namun juga kepada masyarakat secara luas, karena masyarakatlah yang secara substansi pemegang kedaulatan pemerintahan.

UCAPAN TERIMA KASIH Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mempublikasikan artikel pengabdian ini, semoga di masa datang dapat tercipta hubungan yang baik. DAFTAR RUJUKAN Buku Campbell, RJ. 1991. Developing Human Resources. Washington DC: BNA Books. Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan). Yogyakarta: Gajah Mada University Press Hamalik, Oemar, 2000.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu. Jakarta: Bumi Aksara. Manulang, M., 1994. Management Personalia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Mardikanto T, Soebiato P, 2013. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung. Nugroho, Riant. 2014. Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan. Jakarta: Elex Media Computindo. Theresia, Aprillia, etll, 2014.

Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Alfabeta Artikel/Modul/Diktat Data Topografi Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak tanggal 2 Februari 2019 Jurnal Ramdhani, Abdullah dan Ramdhani, AM (2017), Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, Jurnal Publik, Vol. 11; No.

01; 2017;1-12 DOKUMENTASI KEGIATAN

INTERNET SOURCES:

<1% - <http://journal.ipb.ac.id/index.php/j-agrokreatif/article/download/18792/13238>

1% -

<https://petanimudaberdiri.blogspot.com/2016/09/makalah-azaz-dan-comunity-development.html>

5% -

https://www.researchgate.net/publication/329338646_Peningkatan_Kapasitas_Aparatur_Pemerintahan_Desa_dan_Masyarakat_Melalui_Pelatihan_Administrasi_Pemerintahan_di_Desa_Sukamenak_Kecamatan_Cikeusal_Kabupaten_Serang

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/329816573_Pengembangan_Wirausaha_Muda_Ekonomi_Kreatif_Berbasis_Budaya_di_Daerah_Istimewa_Yogyakarta

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/265865101_The_Nature_of_a_Public_Service

<1% -

http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/ga2019/pdf/Chapter_Safeguarding.pdf

<1% - <http://idp-key-resources.org/documents/0000/d04267/000.pdf>

<1% - <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121207002531>

<1% - <https://rsa.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2157930X.2014.925246>

4% -

<https://www.ksi-indonesia.org/document/material/Modul-Pelatihan-Analis-Kebijakan.pdf>

1% -

<http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/3912-modul-1-konsep-dan-studi-kebijakan-publik>

<1% -

<https://briyanworld.blogspot.com/2017/04/pendekatan-pengambilan-keputusan.html>

1% - <http://digilib.uinsby.ac.id/15893/4/Bab%202.pdf>

<1% - <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snkppm/article/download/150/113/>

1% -

https://www.researchgate.net/publication/313842407_Konsep_Umum_Pelaksanaan_Kebijakan_Publik

<1% -

<https://jasrilcalegpartainasdem.blogspot.com/2013/10/desentralisasi-problem-ekonomi-politik.html>

1% -

http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14107/2/T2_092013005_BAB%20II.pdf

<1% - <https://id.wikipedia.org/wiki/Kompos>

<1% - <https://lembahperasaan.blogspot.com/2010/03/teori-analisis-kebijakan.html>

<1% -

<http://digilib.unila.ac.id/23773/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
<1% -

https://www.academia.edu/31676210/0_slide_Pemberdayaan_Masyarakat_2016_tatap_muka_4.ppt
1% - <http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/view/15809>
<1% -

https://www.academia.edu/29235580/BAB_VI_PEMBELAJARAN_LITERASI_MEMBACA
<1% -

<http://lppm.unsera.ac.id/upload/files/2019-08-08-02-09-11FORMAT%20LAPORAN%20DPL.doc>
<1% - http://snti2017.industri.unimal.ac.id/images/proceeding/026_Syamsul.pdf
<1% -

<https://ianabimanyusgm.blogspot.com/2010/11/bab-i-pembahasan-pengertian-akuntansi.html>
<1% -

<https://rennetabengkulu.blogspot.com/2013/10/contoh-laporan-di-kantor-desa.html>
<1% -

https://www.researchgate.net/publication/319235422_IbM_Penataan_Administrasi_Pemerintahan_Desa_Dalam_Menyongsong_Diberlakukannya_Uu_Desa
<1% -

<https://bagshinseogenk.blogspot.com/2011/07/skripsi-upaya-peningkatan-kemampuan.html>
<1% - <https://fas.rg.telkomuniversity.ac.id/author/fa/>
<1% -

<https://anan-nur.blogspot.com/2012/01/evaluasi-program-pendidikan-prof-dr.html>
<1% -

https://jdih.big.go.id/media/resources/files/law/tUF25Yj2xW_Perka_Ketelitian_Peta_Dasar_-_Salinan.pdf
<1% -

https://derrymayendra.blogspot.com/2014/10/peran-perempuan-dalam-sistem-politik_1.html
<1% -

https://www.academia.edu/4971409/IMPLEMENTASI_PROGRAM_BAHTERAMAS_PROVINSI_SULAWESI_TENGGARA
<1% - <http://jss.lppm.unila.ac.id/index.php/ojs/article/download/120/77/>
<1% - <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/PengabdianUMRI/article/download/418/358/>
1% - [http://repository.upi.edu/7854/7/d_adpen_0602450_bibliography\(1\).pdf](http://repository.upi.edu/7854/7/d_adpen_0602450_bibliography(1).pdf)
<1% -

https://www.academia.edu/28673238/DAFTAR_PUSTAKA_jngn_dipindah_atau_dihapus
1% - <http://eprints.ums.ac.id/59929/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

